

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2004 s/d 2007**

**TUGAS AKHIR**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan  
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

**RENNI KURNIAWITA**

**06 096 030**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**





No. Alumni Universitas	<b>Renni Kumiawita</b>	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------------------	---------------------

a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 14/01/1984 b) Nama Orang Tua: Zarnan Gani dan Samiwati c) Fakultas: Politeknik Negeri Padang d) Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NIM: 060960301 j) Tgl Lulus: 19 Agustus 2009 g) Predikat Lulus :Sangat Memuaskan h) IPK: 3,36 i) Lama studi: 32 bulan k) Alamat orang tua: Jl. M. Yunus No. 183 RT. 05 RW. 03 Kel. Anduring Kec. Kuranji Padang

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2004 s/d 2007  
Skripsi DIV oleh Renni Kumiawita. Pembimbing 1. Desi Handayani, SE. Ak., 2. Gustati, SE. Ak

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Padang melaksanakan tanggungjawab finansialnya kepada publik dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan Keuangan yang diteliti adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang tahun 2004-2007 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan ini menggunakan format penyajian laporan keuangan berdasarkan Kepmendagri 29/2002 untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2004-2005 dan PP No.24/2005 untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2006-2007. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *time series*, dengan alat ukur berupa analisis pertumbuhan, analisis trend, rasio keuangan, analisis arus kas perkomponen dan analisis arus kas bebas. Hasil dari analisis ini adalah Pemerintah Kota Padang memiliki rasio keuangan yang likuid dan solvabel (mampu memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang) dimana rasio solvabilitasnya sebesar 87,69 untuk tahun 2007 dan 65,99 untuk tahun 2006, sedangkan untuk tahun 2004 dan 2005 rasio keuangan Pemerintah Kota Padang solvable namun tidak likuid (kurang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tetapi secara keseluruhan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya) dimana rasio solvabilitas sebesar 158,62 tahun 2005 dan 175,53 tahun 2004. Standar rasio yang dianggap aman yaitu >1. Jadi kinerja Pemerintah Kota Padang telah mengalami peningkatan selama empat tahun berturut-turut.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 Agustus 2009  
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Zahara, SE.M.Ak.Ak	Dedy Djefris, SE.M.Ak.Ak	Anda Dwi Haryadi, SE.Ak	Desi Handayani, SE.Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE.MM.Ak  
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dengan membangun sistem *good government governance* yang kokoh melalui pembangunan standar-standar akuntansi dan keuangan untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pembangunan standar akuntansi sektor publik tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum yang kuat dan jelas bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi pemerintah harus dilaporkan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

*World Bank* dalam Mardiasmo (2002:18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) karakteristik pelaksanaan *good governance* ini meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision*. Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik dalam penciptaan *good government governance*, yaitu penciptaan akuntabilitas publik,

transparansi, dan *value for money (economy, efficiency, dan effectiveness)* (Mardiasmo, 2002:18).

Dalam konteks organisasi pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas publik yaitu berupa pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja *financial* pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2002:21).

Di Indonesia, perkembangan akuntansi sektor publik semakin pesat seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu Ketetapan MPR, yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang berlaku sejak Januari 2001 tersebut adalah untuk menciptakan *government governance*. Sejalan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor

publik di Indonesia adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (*financial accountability*), akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*), akuntabilitas hukum (*legal accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik tersebut adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005, SAP selanjutnya dipublikasikan dan didistribusikan kepada publik termasuk masyarakat, institusi, serta perwakilan organisasi. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan dan lain-lain. Dengan adanya SAP diharapkan adanya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pada dasarnya fungsi utama dari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi akan dapat membantu pengguna laporan keuangan lebih mudah memahami informasi-informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta

agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding (*Comparability*). Dengan adanya standar akuntansi maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Meskipun laporan keuangan tersebut sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak dari berbagai latar belakang, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan itu dengan baik. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan, bagaimana menafsiran angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2007:8), sehingga tujuan pelaporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas publik dapat tercapai dan *good governance* dapat diwujudkan.

Pemerintah daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang dimilikinya. Baik SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang milik daerah, maupun PPKD selaku pengelola anggaran/pengelola barang milik daerah harus mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih studi kasus mengenai Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, dimana banyak permasalahan yang ditemui dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Padang terutama belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu penulis tertarik menganalisa laporan keuangan Pemerintah Kota Padang karena pada tahun anggaran 2007 terjadinya kelemahan dalam pengendalian intern Pemerintah Kota Padang

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari analisis terhadap laporan keuangan Kota Padang untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kota Padang memiliki rasio keuangan yang likuid dan solvabel untuk tahun 2007 dan 2006 artinya pemerintah daerah mampu dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan untuk tahun 2004 dan 2005 rasio keuangan Pemerintah Kota Padang solvabel namun tidak likuid artinya Pemerintah Kota Padang kurang memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai semua kewajiban jangka pendeknya.
2. Dari tahun anggaran 2007-2004 Pemerintah Kota Padang mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Kota Padang telah dilaksanakan dengan baik.
3. Kinerja belanja Pemerintah Kota Padang mengalami peningkatan selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2004-2007. Efisiensi belanja terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu 88,38% dan efisiensi belanja terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 93,84%. Belanja tersebut efisien jika rasionya kurang dari 100% yang mana realisasi belanja lebih kecil dari pada yang dianggarkan.
4. Dilihat dari segi pembiayaan, Pemerintah Kota Padang Peningkatan nilai SiLPA sebesar 45,34% ini menunjukkan adanya kinerja yang baik pada

Pemerintah Kota Padang pada tahun anggaran 2006-2007. Ditandai dengan SiLPA tahun 2007 yaitu Rp 134,086,499,957.11 dan Rp 92,253,900,947.79 untuk tahun 2006. Tahun 2004 dan 2005 Pemerintah Kota Padang tidak memiliki SiLPA karena surplus dana yang diperoleh digunakan seluruhnya untuk menutupi defisit pembiayaan netto.

5. Pemerintah Kota Padang mengalami kas bersih yang berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2006 terjadi pertumbuhan kas yang signifikan sebesar 4868%. Ini berarti arus kas masuk Pemerintah Kota Padang sangat besar melebihi arus kas keluarnya. Namun untuk tahun 2007 terjadi penurunan jumlah kas dari tahun sebelumnya menunjukkan penurunan kinerja keuangan, walaupun tidak bisa dikatakan terjadi kegagalan keuangan, tetapi hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan tahun berikutnya.

## 5.2 SARAN

1. Bagi penelitian selanjutnya, untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja pemerintah melalui analisis laporan keuangan yang lebih mencerminkan keadaan sebenarnya sebaiknya juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja dari pemerintah daerah, seperti kondisi ekonomi makro yang termasuk di dalamnya tingkat ekonomi regional dan inflasi.
2. Jangka waktu penelitian diperpanjang agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang lebih jelas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga: Jakarta.
- BPS Kota Padang. 2007. "Padang dalam Angka". Badan Pusat Statistik Padang.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02, "*Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah*". Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2006.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. YKPN: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba Empat: Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi Pertama*. BPFE : Yogyakarta
- Mahmudi. 2007. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- PemkoPadang. (2008). *Gambaran Umum Kota Padang*. Ditelusuri 20 Juli 2009. <http://www.PemkoPadang.go.id>
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.